

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP Keuangan (94%), 9 LHP Kinerja (1%) dan 33 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT) (5%). Secara umum, dari hasil pemeriksaan laporan keuangan, BPK memberikan klasifikasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 469 (73%) dari 645 LK K/L. Sedangkan hasil pemeriksaan atas Kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas program tertentu yang mendapatkan anggaran negara melalui APBN. Begitujuga hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah senilai Rp509,61 miliar (2%).

Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi I terdapat 11 (sebelas) entitas yang dilakukan pemeriksaan, 10 (sepuluh) entitas pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 1 (satu) entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan terdapat 6 (enam) entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan 2 (dua) entitas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu LK Kementerian Pertahanan dan Lembaga Penyiaran Publik RRI. Kemudian untuk 2 (dua) entitas pemeriksaan Laporan Keuangan lainnya yaitu Badan Keamanan Laut dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Kementerian/Lembaga seluruh Mitra Komisi I memperoleh anggaran belanja sebesar Rp133.082.229.664.000,00 dengan nilai realisasi belanja sebesar Rp114.290.176.542.908,00 (85,87%). Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh sebesar Rp19.411.466.319.108,00.

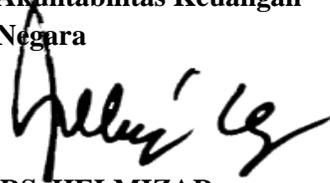
Klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Mitra Komisi I yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp65.059,30juta; berpotensi kerugian Negara Rp1.949.917,19juta; dan mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp70.212,18juta.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan bagi Komisi I untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi I sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja Komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Oktober 2017

**Kepala Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan
Negara**



DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	i
2. Daftar Isi.....	iv
3. Telaahan Kementerian.....	1
3.1. Badan Intelijen Negara	1
3.1.1. Gambaran Umum.....	1
3.1.2. Daftar Temuan.....	3
3.1.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	5
3.1.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	7
3.2. Badan Keamanan Laut	9
3.2.1. Gambaran Umum.....	9
3.2.2. Daftar Temuan.....	11
3.2.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	13
3.2.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	15
3.3. Dewan Ketahanan Nasional	17
3.3.1. Gambaran Umum.....	17
3.3.2. Daftar Temuan.....	19
3.3.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	21
3.3.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	23
3.4. Kementerian Komunikasi dan Informatika	25
3.4.1. Gambaran Umum.....	25
3.4.2. Daftar Temuan.....	27
3.4.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	31

3.5.	PDDT Pengelolaan BA 999.08 Kementerian Kominfo	47
3.5.1.	Gambaran Umum.....	47
3.5.2.	Daftar Temuan.....	49
3.5.3.	Telaahan atas Pokok-pokok Permasalahan ...	51
3.6.	Kementerian Luar Negeri	59
3.6.1.	Gambaran Umum.....	59
3.6.2.	Daftar Temuan.....	61
3.6.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	63
3.6.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	71
3.7.	Kementerian Pertahanan	79
3.7.1.	Gambaran Umum.....	79
3.7.2.	Daftar Temuan.....	81
3.7.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	83
3.7.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	89
3.8.	Lembaga Ketahanan Nasional	93
3.8.1.	Gambaran Umum.....	93
3.8.2.	Daftar Temuan.....	95
3.8.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	97
3.8.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	99
3.9.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	101
3.9.1.	Gambaran Umum.....	101
3.9.2.	Daftar Temuan.....	103
3.9.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	105
3.9.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	111

3.10.	Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP TVRI)	113
3.10.1.	Gambaran Umum.....	113
3.10.2.	Daftar Temuan.....	115
3.10.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	119
3.11.	Lembaga Sandi Negara	139
3.11.1.	Gambaran Umum.....	139
3.11.2.	Daftar Temuan.....	141
3.11.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	143
3.11.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	145

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Intelijen Negara (BIN) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BIN dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BIN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Realisasi Pendapatan (PNBP)**
Rp1.022.235.248,00
- **Anggaran Belanja**
Rp2.425.308.451.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp2.187.501.961.923,00 (90,19%)

NERACA

- **Aset**
Rp 3.338.295.253.734,00
- **Kewajiban**
Rp11.666.972.148,00
- **Ekuitas**
Rp3.326.628.281.586,00

Temuan

**Kepatuhan
Perundang-undangan
2 Temuan**



40%

60%

**Sistem Pengendalian
Intern
3 Temuan**



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

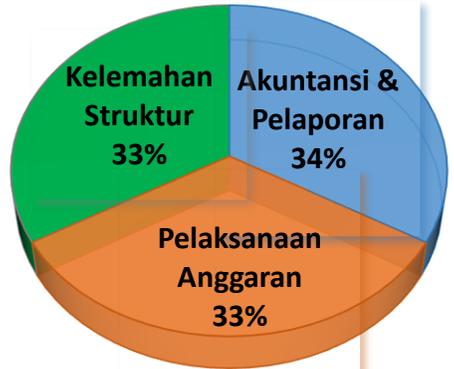
1
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

1
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

1
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Administrasi

tidak berdampak keuangan

Tabel berikut di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai temuan yang diungkap oleh BPK dalam Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada grafik di atas.

NO	TEMUAN
PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1	Kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) termasuk Persediaan belum sepenuhnya lengkap
2	Sistem Aplikasi Persediaan, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) belum sepenuhnya mendukung penyajian Laporan Keuangan Badan Intelijen Negara secara akrual
3	Penatausahaan Barang Milik Negara di Badan Intelijen Negara belum tertib
PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
4	Pengadaan paket pekerjaan Proteksi Petir Binda 13 lokasi belum sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
5	Perubahan spesifikasi barang dalam kontrak Belanja Modal tanpa melalui Addendum.

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini adalah temuan-temuan yang menjadi **pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan** atas LK Badan Intelijen Negara (BIN) TA 2016 yang diungkap BPK RI sebagaimana tercantum di dalam tabel poin 2 dan 5.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KEAMANAN LAUT TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Bakamla dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Bakamla dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014

2015

BPK memberikan opini TA 2016:
**Tidak Menyatakan Pendapat
(TMP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp3.515.000,00
- **Anggaran Belanja**
Rp1.876.164.938.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp759.186.683.662,00 (40,46%)

NERACA

- **Aset**
Rp556.107.198.334,00
- **Kewajiban**
Rp269.295.095,00
- **Ekuitas**
Rp555.837.903.239,00

Temuan

**Kepatuhan
Perundang-undangan
2 Temuan**



40%

60%

**Sistem Pengendalian
Intern
3 Temuan**



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi & Pelaporan

2
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

2
Permasalahan

Pelaksanaan
Anggaran
50%

Akuntansi &
Pelaporan
50%

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

4
Permasalahan

• Administrasi

tidak berdampak
keuangan

Tabel berikut di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai temuan yang diungkap oleh BPK dalam Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada grafik di atas.

NO	TEMUAN
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1	Nilai peralatan <i>Monitoring Satellite</i> dalam KDP sebesar Rp22,23 miliar tidak dapat dilakukan pengujian penilaiannya
2	Penggangan belanja atas tiga kegiatan di Bakamla tidak tepat
3	Proses serah terima BMN dari Kemenko Polhukam kepada Bakamla belum dilaksanakan per 31 Desember 2016
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
4	Mekanisme pengadaan tiga kegiatan Belanja Modal tidak sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2010 dan pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan
5	Belanja barang pengadaan Bahan Bakar Minyak dan pemeliharaan gedung sebesar Rp13,95 miliar digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya dan belanja pengadaan Bahan Bakar Minyak belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp5,88 miliar

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah temuan-temuan yang menjadi **dasar dikeluarkannya opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)** oleh BPK atas Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap Laporan Keuangan Badan Keamanan Laut TA 2016 sebagaimana tercantum di dalam tabel nomor 1 dan 5.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Wantannas dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Wantannas dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

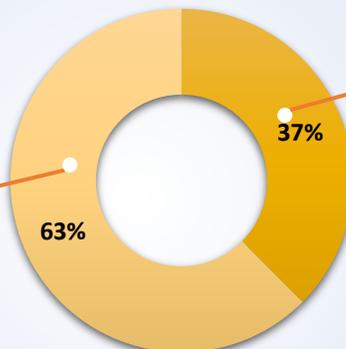
- **Pendapatan (PNBP)**
Rp31.548.253,00
- **Anggaran Belanja**
Rp158.365.742.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp141.833.168.069,00 (89,56%)

NERACA

- **Aset**
Rp 143.019.648.419,00
- **Kewajiban**
Rp493.918.488,00
- **Ekuitas**
Rp142.525.729.931,00

Temuan

**Kepatuhan
Perundang-undangan
5 Temuan**



**Sistem Pengendalian
Intern
3 Temuan**



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

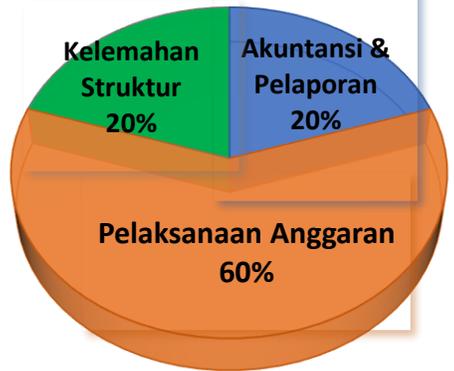
1
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

3
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

1
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

Rp230,06
Juta

• Kekurangan Penerimaan

Rp75,79
Juta

• Administrasi

2
Permasalahan

Tabel berikut di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai temuan yang diungkap oleh BPK dalam Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada grafik di atas.

NO	TEMUAN
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1	Saldo Kas dan pembayaran secara tunai melebihi ketentuan yang berlaku
2	Pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Wantannas belum sepenuhnya sesuai ketentuan
3	Pekerjaan tambah/kurang pada kegiatan pengadaan penataan gedung/bangunan/ruang kerja tidak dituangkan dalam addendum kontrak
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
4	Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan sebesar Rp325,02juta dan Pajak Penghasilan yang belum disetor per 31 Desember 2016 sebesar Rp202,59juta.
5	Pembayaran uang imbalan rapat sebesar Rp164,15juta yang tidak didukung bukti presensi sesuai waktunya.
6	Realisasi belanja perjalanan dinas pegawai pada Dewan Ketahanan Nasional melebihi batas tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp65,91juta.
7	Pekerjaan pembangunan Sistem Informasi Data Bahan dan Produk Kajian Wantannas Tahun 2016 belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
8	Perencanaan atas pekerjaan pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Wantannas belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini adalah temuan-temuan yang menjadi **pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan** atas LK Dewan Ketahanan Nasional TA 2016 yang diungkap BPK RI sebagaimana tercantum di dalam tabel nomor 1 dan 4.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Kementerian Kominfo dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementerian Kominfo dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
TMP

2015
WDP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Anggaran Pendapatan**
Rp16.570.875.364.968,00
- **Realisasi Pendapatan**
Rp18.102.486.172.105,00 (109,24%)
- **Anggaran Belanja**
Rp5.121.498.379.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp3.582.735.979.512,00 (69,95%)

NERACA

- **Aset**
Rp14.700.504.521.319,00
- **Kewajiban**
Rp10.358.011.965.399,00
- **Ekuitas**
Rp4.342.492.555.920,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan
10 Temuan



36%

64%

Sistem Pengendalian Intern
18 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

11
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

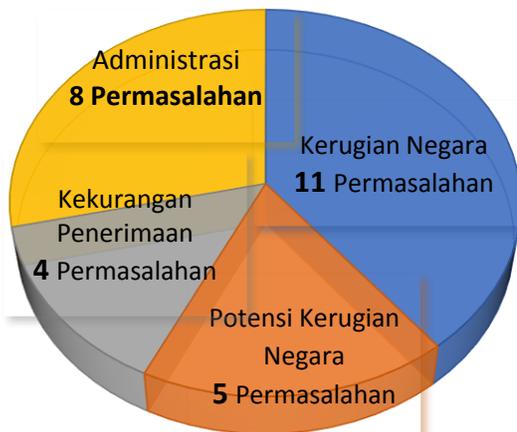
7
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

11
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

Rp45.133,68
Juta

• Potensi Kerugian Negara

Rp1.949.917,19
Juta

• Kekurangan Penerimaan

Rp20.410,20
Juta

• Administrasi

tidak
berdampak
keuangan

Tabel berikut di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai temuan yang diungkap oleh BPK dalam Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada grafik di atas.

NO	TEMUAN
PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Sistem Pengendalian Pendapatan	
1	PNBP kontribusi penyelenggara Pos untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal dan hak pengelolaan nama domain Indonesia tahun 2016 belum disajikan dalam Laporan Keuangan
2	Prosedur pengurusan izin penyelenggaraan penyiaran belum menjamin kepastian waktu penyelesaian
3	Penatausahaan PNBP pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika belum memadai
Sistem Pengendalian Belanja	
4	Program Bantuan Satu Juta Domain pada Direktorat <i>e-Business</i> Ditjen Aptika belum direncanakan dan dilaksanakan secara optimal
5	Hibah langsung dari KOICA pada Ditjen Aptika dan Balitbang Kemkominfo senilai Rp86,78 miliar belum mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan
6	Kesalahan klasifikasi Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam penganggaran belanja MAK 52 sebesar Rp12,93 miliar
Sistem Pengendalian Aset	
7	Sistem Pengendalian Intern pengelolaan keuangan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Kementerian Komunikasi dan Informatika masih lemah
8	Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi pada enam Wajib Bayar sebesar Rp1,60 triliun berlarut-larut
9	Hasil pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara-Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (OPN-BPKP) dan hasil pencocokan dan penelitian berdampak pada perhitungan kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) sebesar Rp15,89 miliar belum ditindaklanjuti untuk penagihan

10	Pengelolaan Bank Garansi (BG) pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) tidak memadai
11	Rugi Aset Tetap Tanah Balmon Kelas II Bandung masih belum dapat dieksekusi
12	Penatausahaan dan pelaporan Persediaan pada Kemkominfo belum memadai
13	Pengelolaan Aset Tetap di lingkungan Kemkominfo belum memadai
14	Penatausahaan Aset Tetap Renovasi senilai Rp7,16 miliar pada Neraca Kemkominfo Tahun 2016 kurang memadai
15	Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp1,14 miliar pada Balitbang SDM dan Ditjen SDPPI berlarut-larut
16	Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada Kemkominfo belum memadai
Sistem Pengendalian Kewajiban	
17	Penyelesaian Kewajiban Program Tahun Jamak KPU/USO Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika berlarut-larut.
18	Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) tidak optimal dalam Penyelesaian Perselisihan Kewajiban Tahun Jamak KPU/USO di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Pendapatan	
19	Pendapatan bunga deposito dan jasa giro Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Informatika dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp146,69 miliar.
Belanja	
20	Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada beberapa Satker Kemkominfo sebesar Rp560,43juta.
21	Pengadaan penyediaan infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan, terpencil, dan pulau terluar pada BP3TI tidak sesuai ketentuan.
22	Indikasi persaingan tidak sehat antar peserta lelang atas pengadaan sewa kendaraan Komisioner dan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia senilai Rp1,96 miliar.
23	Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tugu Pos dan renovasi kantor sebesar Rp609,35juta.

24	Pengadaan BTS <i>Blank Spot</i> daerah perbatasan pada BP3TI belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp3,64 miliar, tidak selesai sebesar Rp6,15 miliar, dan lebih bayar sebesar Rp5,05 miliar.
25	Pengadaan penyediaan jasa layanan akses internet BP3TI lebih bayar sebesar Rp29,71 miliar tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp66,86 miliar serta pemborosan keuangan negara sebesar Rp12,20 miliar.
26	Kelebihan pembayaran senilai Rp523,98juta dan tidak diyakini kewajarannya senilai Rp173,85juta atas paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pelaksanaan proyek <i>Improvement on Television Transmitting Station Phase II (ITTS-2)</i> dan sarana prasarana pendukung ITTS-2.
27	Kelebihan pembayaran senilai Rp240,28juta dan tidak diyakini kewajarannya senilai Rp62,80juta atas item pekerjaan <i>Site Inspection, Acceptance Test and Meeting</i> pada empat paket pekerjaan perbaikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung proyek ITTS II.
28	Kelebihan pembayaran sebesar Rp1,44 miliar atas pekerjaan pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Stasiun Monitor Tetap <i>Transportable</i> pada Ditjen SDPPI.

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini adalah temuan-temuan yang menjadi **pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan** atas LK Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2016 yang diungkap BPK RI sebagaimana tercantum di dalam tabel nomor 8, 9, 17 dan 18.

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU BPK RI ATAS PENGELOLAAN BA 999.08 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016



Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan BA 999.09 Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemKominfo) Tahun 2016 bertujuan untuk menilai:

- Kesesuaian LK Pengelolaan B A 999.08 KemKominfo dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan;
- efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Kesimpulan BPK:

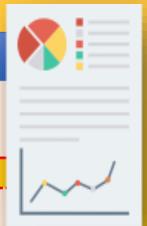
Pengelolaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Anggaran

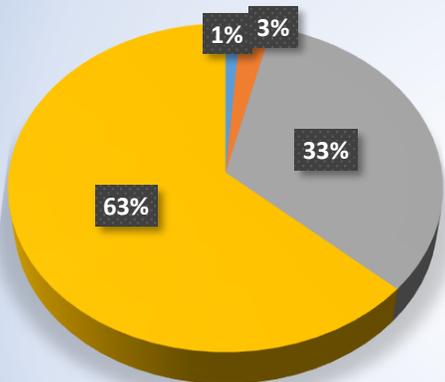
Rp341.598.000.000,00

Realisasi

Rp341.594.000.000,00



Alokasi Belanja



• Belanja Administrasi

Rp4.293.000.000,00

• Belanja Pemeliharaan

Rp8.586.000.000,00

• Belanja Operasi

Rp112.366.856.000,00

• Belanja Pegawai

Rp216.352.144.000,00



Tabel berikut di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai temuan yang diungkap oleh BPK dalam Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada grafik di atas.

NO	TEMUAN
1	Bendahara pengeluaran penyelenggaraan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal tidak menyelenggarakan Buku Kas Umum atas BA 999.08
2	Penetapan Atribusi biaya LPU Regional belum sesuai dengan ketentuan perundangan
3	Pemberian Bantuan Operasional LPU Pos belum sepenuhnya didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai
4	Pencatatan Realisasi Belanja Pegawai LPU Pos KPRK Bandung, Cimahi, dan Soreang belum sesuai dengan ketentuan

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini adalah temuan-temuan yang menjadi **pokok-pokok permasalahan** yang diungkap oleh BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban BA999.08 tahun 2016 Kementerian Komunikasi dan Informatika.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Kemenlu dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemenlu dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WDP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

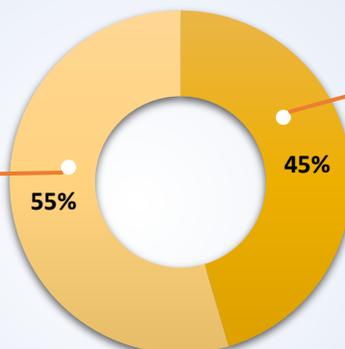
- **Anggaran Pendapatan**
Rp 461.161.286.038,00
- **Realisasi Pendapatan**
Rp675.680.512.378,00 (146,52%)
- **Anggaran Belanja**
Rp7.120.298.228.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp6.115.119.409.251,00 (85,88%)

NERACA

- **Aset**
Rp15.658.167.296.148,00
- **Kewajiban**
Rp990.914.327.580,00
- **Ekuitas**
Rp14.667.252.968.568,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
12 Temuan



Sistem Pengendalian
Intern
10 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

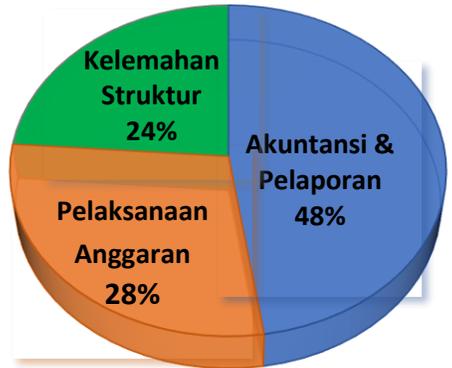
10
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

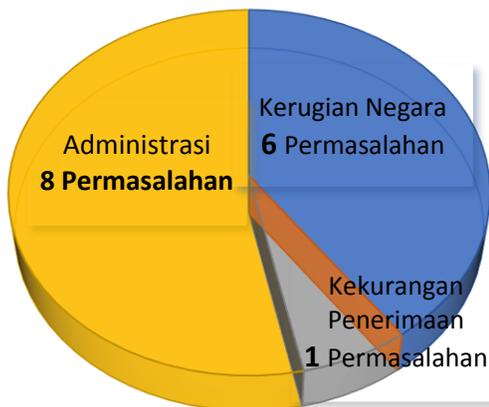
6
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

5
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

Rp363,19 juta
+ Rp385,74 juta
(USD 1,38ribu+
CNY 2,14ribu)

• Kekurangan Penerimaan

SAR 13,59ribu
(Rp48,26 Juta)

• Administrasi

tidak
berdampak
keuangan

Tabel berikut di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai temuan yang diungkap oleh BPK dalam Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada grafik di atas.

NO	TEMUAN
PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
1	Penatausahaan dan pengendalian Kas di Bendahara Pengeluaran belum memadai dan penyelesaian sisa UP/TUP Tahun 2015 akibat selisih kurs belum tuntas.
2	Penatausahaan dan pengendalian Kartu Pengawasan Piutang/Cicilan BPPR belum sepenuhnya memadai.
3	Pembukuan Fihak Ketiga (PFK) Minus belum terselesaikan sebesar USD922.67ribu, Penyelesaian PFK Minus pada KBRI Kuala Lumpur sebesar USD73.49ribu belum sesuai ketentuan, dan terdapat penggunaan Kas Besi sebesar USD279.89ribu tidak tercatat sebagai PFK Minus.
Sistem Pengendalian Aset	
4	Penatausahaan Persediaan belum tertib dan pencatatan atas perolehan persediaan menggunakan mata uang Asing tidak menggunakan kurs saat transaksi.
5	Pencatatan transfer masuk dan transfer keluar Persediaan belum tertib.
6	Penatausahaan Aset Tetap belum tertib dan pencatatan atas perolehan Aset Tetap menggunakan mata uang Asing tidak menggunakan kurs saat transaksi.
Lain-lain	
7	Terdapat realisasi penggunaan belanja barang tidak sesuai dengan peruntukannya.
8	Penatausahaan dan pengendalian PNBP jasa konsuler dan imigrasi KJRI Jeddah belum memadai.
9	Penyelesaian tahanan gaji untuk lima pegawai Pusdiklat Kementerian Luar Negeri berlarut-larut.
10	Pengelolaan Pembayaran Kontribusi Organisasi Internasional belum sesuai dengan Keppres No. 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional

PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja	
11	Honorarium pengajar Diklat dan konsumsi tidak sesuai Standar Biaya Masukan TA 2016 dan melebihi jumlah peserta di Pusat Pendidikan dan Latihan Kemenlu.
12	Kelebihan pembayaran TPLN dan TSR di KJRI Guangzhou sebesar USD1,382.40 dan CNY2,140.78.
13	Penggunaan dan pertanggungjawaban Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan KBRI Zagreb dan KBRI Sarajevo tidak sesuai ketentuan
14	Bukti pertanggungjawaban belanja barang pada KBRI Seoul, KJRI Jeddah, dan KBRI Sarajevo belum dibuat ringkasan berupa terjemahan dalam bahasa Indonesia.
15	Kegiatan representasi pada KBRI Zagreb, KBRI Sarajevo dan KBRI Seoul dilaksanakan tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran atas biaya representasi sebesar Rp10,16juta.
16	Kurang volume pekerjaan renovasi penghawaan Gedung Tower sebesar Rp68,18juta.
17	Penyusunan Harga Perkiraan sendiri untuk pengadaan perangkat <i>Command Center</i> Kemenlu dan infrastruktur pendukungnya tidak sesuai dengan ketentuan.
18	Pengadaan dokumen kekonsuleran pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Tahun 2016 belum sesuai ketentuan.
19	Pelaksanaan rapat di dalam kantor pada tujuh Satker Pusat Kemenlu belum sesuai dengan ketentuan.
20	Pengadaan barang dan jasa pada tujuh perwakilan dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan dan belum ada Juknis pengadaan barang dan jasa.
21	Pelaksanaan kegiatan paket <i>Meeting</i> pada Direktorat Jenderal KS Asean, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dan Biro Perencanaan dan Organisasi tidak sesuai ketentuan.
22	Pemalsuan dokumen oleh pegawai setempat pada KBRI Zagreb merugikan negara sebesar HRK46,881.34 Eq Rp90,29juta.

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini adalah temuan-temuan yang menjadi **pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan** atas LK Kementerian Luar Negeri TA 2016 yang diungkap BPK RI sebagaimana tercantum di dalam tabel nomor 3, 4, 5, 11, 18, 20, dan 21.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Kemhan dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemhan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP-DPP

2015
WDP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Dengan Pengecualian
(WDP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNPB)**
Rp573.891.723,806,00
- **Anggaran Belanja**
Rp112.399.553.513.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp98.088.110.627.974,00 (87,27%)

NERACA

- **Aset**
Rp493.675.556.512.154,00
- **Kewajiban**
Rp9.036.807.479.379,00
- **Ekuitas**
Rp484.638.749.032.775,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan
3 Temuan



33%

Sistem Pengendalian Intern
6 Temuan

67%



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

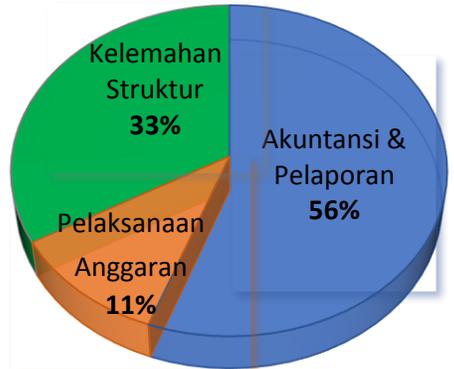
5 Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

1 Permasalahan

• Kelemahan Struktur

3 Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

Rp13.784,14
Juta

• Kekurangan Penerimaan

Rp22.534 Juta +
Rp40.064,01 Juta
(USD9,98 +
EURO242.72)

• Administrasi

tidak
berdampak
keuangan

Tabel berikut di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai temuan yang diungkap oleh BPK dalam Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada grafik di atas.

NO	TEMUAN
PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1	Sistem Pengendalian Internal penatausahaan dan pelaporan keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2016 belum memadai
2	Penatausahaan Persediaan belum memadai dalam mendukung penyajian Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2016
3	Penatausahaan Aset Tetap dalam Aplikasi SIMAK BMN pada Kemhan dan TNI Tahun 2016 belum memadai.
4	Penatausahaan Utang BMP belum memadai dalam mendukung penyajian Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2016.
5	Pengelolaan Hibah di lingkungan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya tertib
6	Pengelolaan PNBPF fungsional di lingkungan Rumkit Unit Organisasi Kemhan dan TNI belum berjalan secara optimal
PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
7	Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya sesuai ketentuan
8	Pelaksanaan pekerjaan pada Kemhan dan TNI belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 senilai Rp8,68 triliun
9	Kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemhan dan TNI belum sesuai ketentuan

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah temuan-temuan yang menjadi **dasar dikeluarkannya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** oleh BPK atas Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan TA 2016 sebagaimana tercantum di dalam tabel nomor 2 dan 7.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Lemhannas dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Lemhannas dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WDP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Anggaran Pendapatan**
Rp504.000.000,00
- **Realisasi Pendapatan**
Rp3.931.160.692,00 (779,99%)
- **Anggaran Belanja**
Rp300.324.243.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp193.352.724.609,00 (64,38%)

NERACA

- **Aset**
Rp468.968.749.731,00
- **Kewajiban**
Rp1.508.615.000,00
- **Ekuitas**
Rp467.460.134.731,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
3 Temuan



43%

Sistem Pengendalian
Intern
4 Temuan

57%



PERMASALAHAN

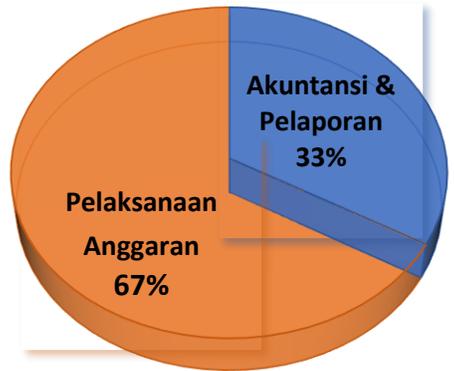
Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

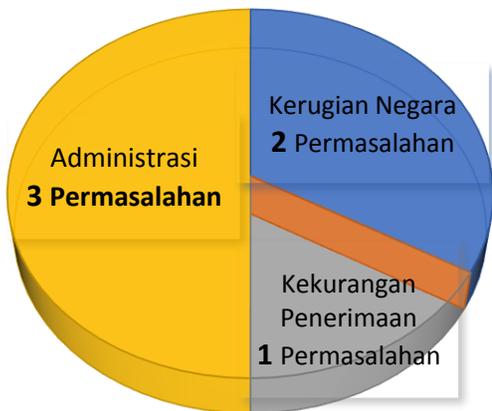
2
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

4
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

Rp186,04
Juta

• Kekurangan Penerimaan

Rp6,76
Juta

• Administrasi

tidak
berdampak
keuangan

Tabel berikut di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai temuan yang diungkap oleh BPK dalam Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada grafik di atas.

NO	TEMUAN
PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1	Lemhannas RI menyewakan gedung untuk kegiatan usaha kepada pihak ketiga belum didukung dengan izin pemanfaatan dari Kementerian Keuangan
2	Kesalahan pembebanan Belanja Barang sebesar Rp427,14juta
3	Penatausahaan Barang Milik Negara pada Lemhannas RI belum memadai
4	Penyusunan anggaran atas honor pengajar dan penceramah pada kegiatan PPRA di Lemhannas RI belum memadai
PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
5	Belanja perjalanan dinas lebih bayar sebesar Rp114,44juta
6	Pekerjaan pengadaan Monitoring dan Pengamanan Jaringan lebih bayar sebesar Rp71,60juta.
7	Perhitungan potongan Pajak Penghasilan pada Lemhannas RI belum tertib.

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini adalah temuan-temuan yang menjadi **pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan** atas LK Lembaga Ketahanan Nasional TA 2016 yang diungkap BPK RI sebagaimana tercantum di dalam tabel nomor 3 dan 5.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP RRI) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK LPP RRI dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK LPP RRI dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
TMP

2015
WDP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Dengan Pengecualian
(WDP)**

Laporan Realisasi Anggaran

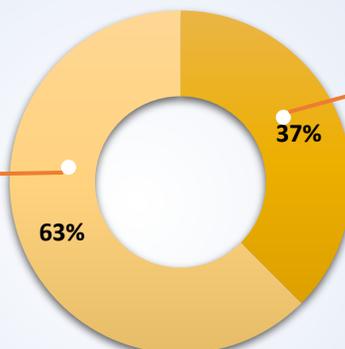
- **Anggaran Pendapatan**
Rp27.171.903.792,00
- **Realisasi Pendapatan**
Rp45.488.470.759,00 (167,41%)
- **Anggaran Belanja**
Rp1.067.194.316.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp929.799.897.075,00 (87,13%)

NERACA

- **Aset**
Rp3.535.356.163.822,00
- **Kewajiban**
Rp9.423.172.385,00
- **Ekuitas**
Rp3.525.932.991.437,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
15 Temuan

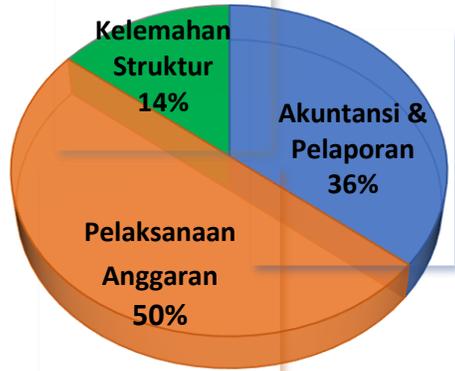


Sistem Pengendalian
Intern
9 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Tabel berikut di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai temuan yang diungkap oleh BPK dalam Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada grafik di atas.

NO	TEMUAN
PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Sistem Pengendalian Pendapatan	
1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak tertib
Sistem Pengendalian Belanja	
2	Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan barang dan jasa
Sistem Pengendalian Aset	
3	LPP RRI belum melikuidasi Satker Direktorat Teknologi dan Media Baru
4	Pengelolaan Piutang Bukan Pajak belum tertib
5	Penatausahaan dan pelaporan Persediaan belum tertib
6	Pencatatan dan penatausahaan Aset belum tertib
7	Pengelolaan Piutang tagihan penjualan angsuran belum tertib
8	Aset Tetap berupa Tanah dan Rumah Negara belum sepenuhnya dikuasai oleh LPP RRI
9	Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp42,25 juta rusak berat dan Rp852,68 juta belum dimanfaatkan
PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Pendapatan Negara dan Hibah	
10	Pendapatan Negara Bukan Pajak tidak disetor sebesar Rp683,50 Juta
Belanja Negara	
11	Pembebanan anggaran belanja barang sebesar Rp1,82 miliar tidak sesuai dengan karakteristik belanjanya

12	Kelebihan pembayaran uang lembur pegawai pada LPP RRI Jakarta sebesar Rp79,62 juta
13	Pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan <i>53rd Asia-Pacific Broadcasting Union & General Assembly & Associated Meeting 2016</i> dan <i>Conference World Broadcasting Union 2016</i> tidak sesuai ketentuan
14	Pertanggungjawaban Belanja Bahan dan Belanja Jasa Profesi sebesar Rp507,10 juta tidak didukung dengan bukti yang memadai dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya
15	Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp208,67 juta
16	Pembayaran transport tim kreatif operasional siaran Pro 1, 2 dan 4 LPP RRI Jakarta tidak sesuai ketentuan sebesar Rp132,10 juta
17	Kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi EDAS sebesar Rp64,80 juta dan tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp147,87 juta pada Direktorat Program dan Produksi Kantor Pusat LPP RRI
18	Pembelian radio untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1,09 miliar tidak sesuai ketentuan
19	Kurang volume atas beberapa pekerjaan sebesar Rp53,17 juta pada Belanja Barang dan Belanja Modal
20	Pemahalan atas beberapa pekerjaan pengadaan Belanja Barang dan Modal sebesar Rp240,39 juta
21	Pengadaan barang dan jasa tidak didukung bukti memadai sebesar Rp510,83 juta
22	Pemborosan pada pengadaan belanja barang dan jasa sebesar Rp150,09 juta
23	Pekerjaan pengadaan barang pada LPP RRI tidak sesuai ketentuan yaitu afdiasi dalam pelaksanaan pengadaan, berindikasi pemecahan kontrak pekerjaan untuk menghindari lelang dan subkontrak dalam pekerjaan
24	Pekerjaan pembuatan ruang PPID/ULP pada Satuan Pengawasan Intern LPP RRI sebesar Rp95,00 juta tidak sesuai ketentuan

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah temuan-temuan yang menjadi **dasar dikeluarkannya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** oleh BPK atas Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap Laporan Keuangan LPP RRI TA 2016 sebagaimana tercantum di dalam tabel nomor 1, 4 dan 10.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK LPP TVRI dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK LPP TVRI dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
TMP

2015
TMP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(TMP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan**
Rp2.619.582.866,00
- **Anggaran Belanja**
Rp872.737.402.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp746.584.122.461,00 (85,55%)

NERACA

- **Aset**
Rp4.037.002.894.072,00
- **Kewajiban**
Rp199.809.436.245,00
- **Ekuitas**
Rp3.837.193.457.827,00

Temuan

**Kepatuhan Perundang-
undangan**
11 Temuan



46%

54%

**Sistem Pengendalian
Intern**
13 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

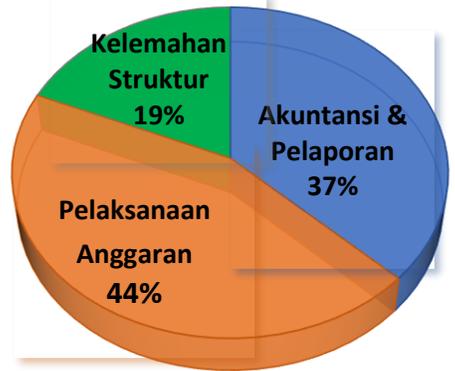
10
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

12
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

5
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

Rp1.651,12
Juta

• Kekurangan Penerimaan

Rp431,94
Juta

• Administrasi

tidak
berdampak
keuangan

Tabel berikut di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai temuan yang diungkap oleh BPK dalam Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada grafik di atas.

NO	TEMUAN
PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Sistem Pengendalian Pendapatan	
1	Pengelolaan dan penatausahaan Pendapatan dan Pendapatan Diterima Dimuka atas jasa siaran LPP TVRI belum tertib
2	Pengelolaan Pendapatan Jasa hasil penyewaan BMN kepada pihak ketiga (non siaran) di LPP TVRI belum memadai
Sistem Pengendalian Belanja	
3	Pembayaran uang makan kepada pegawai LPP TVRI Kantor Pusat sebesar Rp477,95juta tidak didukung dengan kinerja kehadiran yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku
4	Pengendalian atas Belanja BBM untuk kendaraan dinas jemputan karyawan LPP TVRI Kantor Pusat belum memadai
5	Pengendalian atas pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas pada LPP TVRI Kantor Pusat tidak memadai
6	Kelemahan pengendalian atas prosedur pembebanan dan penatausahaan realisasi belanja APBN Tahun 2016 pada LPP TVRI Kantor Pusat
Sistem Pengendalian Aset	
7	Penatausahaan Kas Lainnya dan Setara Kas di LPP TVRI Kantor Pusat kurang memadai
8	Pengendalian atas pengelolaan Uang Muka Belanja/Panjar Kerja dari Dana Jasinonsi tidak memadai
9	Pengelolaan dan penatausahaan Persediaan pada Kantor Pusat LPP TVRI tidak memadai
10	Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin LPP TVRI belum sepenuhnya memadai
11	Pencatatan Aset Tak Berwujud pada Neraca Kantor Pusat LPP TVRI per 31 Desember 2016 belum lengkap
12	Belanja Dibayar Dimuka berupa Pajak Dibayar Dimuka sebesar Rp367,46juta belum didukung bukti potong

Sistem Pengendalian Kewajiban	
13	Penatausahaan Utang Pajak pada LPP TVRI belum memadai
PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Negara	
14	Pembayaran tunjangan anak dewasa sebesar Rp74,73juta tidak didukung dengan Surat Keterangan Kuliah yang masih berlaku
15	Perhitungan upah tenaga <i>Cleaning Service</i> dalam analisa harga satuan pada pengadaan jasa pemeliharaan kebersihan di lingkungan Kantor Pusat LPP TVRI TA 2016 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp117,67juta
16	Pembayaran upah tenaga satpam dan BPJS pada pengadaan jasa pengamanan di lingkungan Kantor Pusat LPP TVRI TA 2016 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp101,29juta
17	Pembebanan belanja diktat profesi tidak memadai, kelebihan pembayaran atas belanja penyediaan konsumsi sebesar Rp66,50juta dan belanja penyediaan tempat penginapan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp120,56juta
18	Pembayaran honorarium pada LPP TVRI Kantor Pusat sebesar Rp143,82juta tidak sesuai ketentuan
19	Realisasi atas Belanja Pemeliharaan Kendaraan per jenis kendaraan per tahun melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2016 sebesar Rp484,40juta dan kelebihan pembayaran atas belanja pemeliharaan kendaraan minimal sebesar Rp200,42juta
20	Bukti pertanggungjawaban biaya produksi paket acara pada LPP TVRI Kantor Pusat tidak memadai dan terdapat kelebihan pembayaran honor personil sebesar Rp111,30juta
21	Kemahalan harga atas pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung pada LPP TVRI kantor pusat dan Stasiun Bali sebesar Rp286,65juta
22	Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung <i>News Room</i> TVRI Tahun 2016 pada kantor pusat tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran atas renovasi gedung pada LPP TVRI Stasiun Bali sebesar Rp24,96juta
23	Penyetoran dan pelaporan Pajak Jasinonsi mengalami keterlambatan, bendahara pengeluaran tidak memungut PPh Pasal 22 dari transaksi

	Belanja Jasinonsi dan terdapat pembayaran pajak orang pribadi yang tidak seharusnya sebesar Rp217,66juta
Kewajiban	
24	Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Pajak sebesar Rp49,73juta tidak didukung bukti yang memadai dan terdapat pajak yang belum disetor sebesar Rp129,51juta

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah temuan-temuan yang menjadi **dasar dikeluarkannya opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)** oleh BPK atas Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap Laporan Keuangan LPP TVRI TA 2016 sebagaimana tercantum di dalam tabel nomor 1, 2, 6, 7, 8, 9, dan 10.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA SANDI NEGARA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Lemsaneg dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Lemsaneg dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WDP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Realisasi Pendapatan**
Rp6.311.398.001,00
- **Anggaran Belanja**
Rp1.740.784.452.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp1.545.951.968.372,00 (88,81%)

NERACA

- **Aset**
Rp3.456.081.822.275,00
- **Kewajiban**
Rp482.471.765,00
- **Ekuitas**
Rp3.455.599.350.510,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
2 Temuan



50%

Sistem Pengendalian
Intern
2 Temuan

50%



PERMASALAHAN

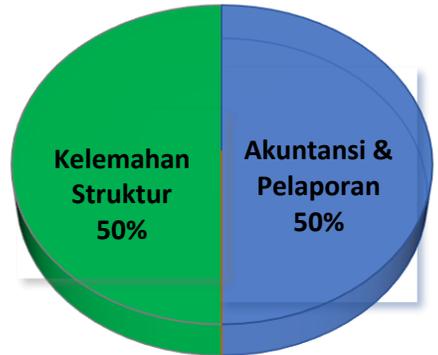
Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

1
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

1
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

Rp1.610,80
Juta

• Kekurangan Penerimaan

Rp210,77
Juta